**“Potret Kegagalan Sistem Pendidikan Indonesia”**

Oleh

Achdian Hardini

*Mahasiswa Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Konsentrasi Ekonomi Moneter 2012*

*Fakultas Ekonomi Universitas Jember*

Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap tanggal 2 Mei, tepatnya pada hari senin yang lalu sempat diwarnai kericuhan. Pemberitaan di berbagai media mengulas tentang kasus pembunuhan dosen di salah satu universitas swasta yang ada di Sumatera Utara. Mirisnya pelaku pembunuhan tersebut merupakan mahasiswanya sendiri yang dilatarbelakangi oleh dendam pribadi. Peristiwa tersebut menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan Indonesia, sekaligus pembelajaran bahwa pendidikan karakter memegang peranan penting untuk membentuk kepribadian seseorang. Betapa pendidikan di Indonesia kerap kali hanya dimaknai sebagai teknik manajerial sekolah dan menitikberatkan pada nilai-nilai kuantitatif akademik kognitif semata.

Iklim pendidikan masa kini, umumnya lebih menuntut para siswanya untuk mendapatkan nilai dan angka yang tinggi tanpa diimbangi dengan pendidikan budi pekerti serta nilai-nilai perjuangan bangsa. Sehingga tak mengherankan jika Indonesia masih belum mampu menghasilkan klas elit modern yang mampu melakukan perubahan secara fundamental terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Generasi yang terbentuk umumnya cetakan generasi yang pragmatis, instan dan konsumtif. Para kaum elite politik masih berkutat pada perebutan posisi untuk melanggengkan kekuasaannya dibandingkan membangun negara. Ketika sikap yang pragmatis berdampingan dengan sifat materialistis, maka pemuasan materi menjadi tujuan tertinggi dalam kehidupan seseorang. Nilai-nilai kejujuran dan kebenaran tak lagi menjadi pedoman, semakin dikesampingkan. Akibatnya, tak mengherankan jika mayoritas penerus bangsa kita hanyalah sekumpulan generasi ‘instan’ yang enggan bersusah payah dalam meraih tujuan.

**Kegagalan Sistem Pendidikan?**

Maraknya tindak kejahatan, korupsi, serta perpolitikan bangsa yang saling adu kekuasaan saat ini, mungkin merupakan suatu bentuk kegagalan pengelolaan pendidikan nasional di masa yang lalu. Seperti yang kita ketahui, sistem pendidikan melalui proses yang cukup panjang sehingga hasilnya dapat dirasakan di masa yang akan datang. Ketika hari ini kita melakukan kesalahan dalam pengelolaan pendidikan, maka hasil yang buruk akan terasa beberapa tahun atau puluhan tahun kemudian. Sebaliknya, ketika hari ini kita berhasil menjalankan dan mengelola sistem pendidikan secara baik lagi bijaksana, maka hasilnya yang memuaskan akan dapat dirasakan di masa depan pula.

Mari menengok ke belakang ketika politik etis yang dicetuskan oleh Van Deventer pada tahun 1901 mulai diberlakukan di tanah air Indonesia. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran dari kaum etis Belanda yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa, serta kerisauan Van Deventer terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini telah diabaikan sedemikian rupa oleh bangsanya sendiri. Kerisauan Van Deventer tersebut ditulis dalam artikel bertajuk “Een Eereschuld” atau “Utang Kehormatan” dalam majalah De Gids Nomor 63 Tahun 1899 di Negeri Belanda. Meski dalam penerapan politik etis tersebut masih terdapat banyak diskriminasi terhadap kalangan pribumi, namun setidaknya rakyat Indonesia dapat merasakan bangku pendidikan. Tak dapat dipungkiri bahwa pengaruh politik etis sangat berperan terhadap pengembangan dan perluasan dunia pendidikan di Indonesia. Sementara itu, dalam masyarakat telah terjadi semacam pertukaran pemikiran antara orang-orang Belanda dan orang-orang pribumi. Kalangan pendukung politik etis merasa prihatin terhadap pribumi yang mendapatkan diskriminasi sosial budaya oleh Belanda. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka berusaha menyadarkan kaum pribumi agar melepaskan diri dari belenggu feodal dan mengembangkan diri melalui proses emansipasi, perjuangan meraih kebebasan hak asasi manusia. Beberapa tahun kemudian mulai terlihat dampak dari penerapan politik etis tersebut. Hal itu ditandai dengan munculnya generasi-generasi baru yang secara terus menerus berkembang dan puncaknya yaitu terciptanya kongres pemuda pada tahun 1928, hingga berujung pada kemerdekaan Indonesia.

Bagaimana dengan generasi yang ada saat ini? Para ‘*agent of changes*’ bangsa cenderung sibuk dengan rangkaian aksi dan orasinya di jalanan. Seolah bertameng idealisme, dengan semangat juang mereka berdemonstrasi memenuhi jalanan menuntut suara-suara mereka didengarkan para petinggi negara. Tak ada yang salah memang dengan aksi demo tersebut, hanya saja tak ada cara lainkah untuk menyuarakan suara secara elegan dan terpelajar? Bukankah almamater kebanggaan telah menunjukkan bahwa mereka adalah ‘*agent of changes*’ yang seharusnya mampu membawa perubahan baik terhadap tatanan sosial di masyarakat? Lalu apa bedanya mahasiswa tersebut dengan masyarakat lainnya yang umumnya tidak mengenyam bangku perkuliahan? Mahasiswa lahir dari rahim rakyat, memang seharusnya turut menyuarakan suara rakyat yang tak tersuarakan, memperbaiki apa yang salah pada perekonomian dan perpolitikan Indonesia saat ini. Pergerakan mahasiswa bukan hanya sekedar turun ke jalan untuk demonstrasi saja, melainkan harus lebih substansial lagi yaitu diskusi, kajian dan lain sebagainya. Lebih baik lagi jika para mahasiswa memiliki kepedulian terhadap rakyat yang dapat ditunjukkan dengan memberikan bantuan baik secara moril dan materil bagi siapa saja yang membutuhkannya. Bukankah mahasiswa yang katanya sebagai ‘agen perubahan’ harus mampu bersikap demikian? Bersuaralah pada porsi yang secukupnya, bersuaralah pada pihak yang tepat. Menyuarakan pemikiran tak harus melibatkan emosi namun analisis yang kritis, tak harus dengan otot yang saling beradu kekuatan namun menggunakan strategi yang nyata.

**Sebuah Refleksi Bangsa**

“Pendidikan yang baik akan mengajar para cendekiawan mengabdi kepada negeri dan rakyatnya dengan teliti dan bersungguh-sungguh, mencintai tanah air mereka dan rela mengorbankan jiwa demi kepentingan bangsa”, itulah sebuah kalimat yang dikutip dari Soetomo, salah satu pendiri Budi Utomo. Pada pemaparan sebelumnya telah dijelaskan bahwa politik etis yang terjadi pada tahun 1901 telah membawa dampak munculnya ‘priyayi jawa baru’ atau priyayi rendahan, mereka memiliki pandangan bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan. Meski kondisi tanah Jawa pada saat itu masih di latar belakangi situasi ekonomi yang buruk akibat eksploitasi penjajahan Belanda, hal tersebut tak menyurutkan niat golongan priyayi ini untuk mendapatkan hak pendidikannya. Berawal dari berdirinya Budi Utomo yang telah melahirkan gagasan-gagasan baru dan mencetak para priyayi yang berwawasan luas, serta berhasil menciptakan generasi cetak biru yang mampu membawa perubahan yang berarti terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Lalu bagaimana dengan hasil dari sistem pendidikan Indonesia saat ini? Tatkala Indonesia hampir melewati 108 tahun kebangkitan nasional, mampukah memunculkan kembali generasi-generasi yang berwawasan dan berkarakter seperti pendahulu kita, Soetomo, Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat, Soekarno dan Hatta yang telah menjadi tonggak perubahan bangsa Indonesia? Ataukah adanya peningkatan anggaran pendidikan sebesar 20% APBN yang dianggarkan untuk kemajuan sistem pendidikan ini hanya membuat gagap bagi para pengelolanya, sehingga bukan generasi yang berwawasan dan berkarakter yang kita hasilkan, melainkan menyuburkan modus-modus baru dalam bungkus korupsi yang melingkupi oknum-oknum tertentu tak bertanggung jawab.

Kecurigaan penyelewengan anggaran pendidikan tersebut bukannya tanpa dasar, berdasarkan hasil pemantauan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), terungkap bahwa selama satu dasawarsa terakhir ini terdapat 296 kasus korupsi pendidikan. Indikasi kerugian negara diperkirakan sebesar 619 miliar rupiah dengan jumlah tersangka sebanyak 479 orang. Hampir tidak ada dana pendidikan yang lolos dari belenggu korupsi, begitulah kesimpulan dari hasil kajian ICW soal korupsi pendidikan di Indonesia. Bagaimana tidak, mulai dari alokasi APBN dan APBD seperti BOS, beasiswa, pembangunan dan rehabilitasi sekolah, gaji dan honor guru, pengadaan buku, pengadaan sarana prasarana, operasional, dana-dana tersebut umumnya dikorupsi oleh politisi, rektor, pejabat kampus, kepala sekolah, pejabat dan rekanan pemerintah. Betapa tindakan korupsi tersebut sangat mencederai hak generasi bangsa untuk memperoleh pendidikan yang selayaknya. Jika dalam segi moralitas saja bangsa kita masih belum dapat membenahi, lalu bagaimana caranya dapat membentuk generasi penerus bangsa yang berwawasan, berkarakter budi pekerti dan mampu menjadi tonggak kemajuan bangsa?